KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gerindra nolak pembangunan gedung baru dewan belum diperlukan
Tanggal : Rabu, 04 November 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Gerindra Nolak

Pembangunan Gedung Baru Dewan Belum Diperlukan

Masih ada kerikil-kerikil kecil yang mengadang rencana pembangunan gedung baru DPR. Selain fraksi KIH, KMP juga belum kompak menyetujui proyek multiyears yang anggarannya sudah dicantumkan dalam APBN 2016 itu.

ANGGOTA utama Koalisi Merah Putih (KMP) Fraksi Gerindra masih menolak rencana pembangunan gedung baru DPR, sementara Golkar dan PAN setuju proyek tersebut dilanjutkan.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, fraksinya menolak rencana pembangunan gedung baru DPR yang alokasi dananya sudah tercantum dalam APBN 2016 sebesar Rp 740 miliar.

Dikatakan, penolakan Fraksi Gerindra sudah disampaikan sejak pengambilan keputusan terhadap APBN 2016 di rapat paripurna DPR, Jumat lalu. "Kami tetap menolak. Saya pikir, fraksi lain juga ada yang keberatan dan menolak proyek ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen, kemarin.

Dasco menjelaskan, alasan fraksinya menolak pembangunan gedung baru DPR karena melihat situasi ekonomi negara yang masih terpuruk. "Ketua DPR sudah ngomong, proyek ini masih bisa dibicarakan. Dalam kondisi saat ini masih belum perlu," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Roem Kono meminta, semua pihak tidak ribut soal pembangunan gedung DPR. Menurutnya, anggaran Rp 740 miliar belum cukup untuk pembangunan gedung baru DPR. "Anggaran sebesar itu tidak cukup, karena itu proyek ini dibiayai lewat multiyears," katanya di gedung DPR, kemarin.

Roem menjelaskan, tidak semua dana dari anggaran sebesar Rp 740 miliar itu bisa langsung digunakan untuk pembangunan gedung baru, masih ada sekitar Rp 175 miliar yang ditunda pencairannya karena pemerintah belum punya uang.

Ia menuturkan, pembangunan gedung baru DPR akan dilakukan secara bertahap. "Sudah ada keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum, bahwasanya pembangunan dilakukan multiyears. Sekarang, pelaksanaannya dilakukan oleh Kesekjenan DPR," ujarnya.

Roem menegaskan, pembangunan gedung baru bukan untuk dinikmati anggota DPR periode sekarang, tetapi periode berikutnya. "Saya ingin semua pihak mengerti bahwa kebutuhan pembangunan gedung ini sangat mendesak bagi 560 anggota DPR yang ada di sini, karena ruangannya sudah tidak cukup. Kita jangan terlalu apriori karena gedung ini berguna bagi bangsa 100-200 tahun ke depan," tegasnya.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menegaskan, fraksinya mendukung rencana pembangunan gedung baru wakil rakyat. "Tidak semua pembangunan di DPR itu haram, pembangunan ini perlu untuk menunjang kinerja," tegasnya.

Menurut Yandri, beberapa fasilitas di gedung DPR perlu di-upgrade. Misalnya, toilet dan ruang tamu. "Sekarang setiap sayap cuma 1 toilet, itu dipakai bersama staf dan tamu anggota. Menurut saya ini perlu direnovasi," ujarnya.

Namun, Yandri menambahkan, Fraksi PAN mendukung pembangunan gedung baru DPR dengan syarat tak ada pemborosan. Pemanfaatan anggaran harus efisien.

"Gedung DPR itu aset negara. Saya belum tentu terpilih dan menikmati fasilitas gedung baru setelah terbangun nanti. Jadi pembangunan ini demi kebaikan bersama," ujarnya.

Wakil Ketua BURT DPR, Dimyati Natakusumah mengatakan, kalau ada yang tidak setuju terhadap proyek ini, sebaiknya aspirasi itu disampaikan kepada pemerintah, soalnya pemerintah yang mengajukan anggaran itu masuk APBN 2016, dalam hal ini anggaran renovasi dan penataan kawasan kompeks parlemen sebesar Rp 740 miliar.

"Pemerintah nggak menolak. Ini juga kepentingan anggota DPR yang akan datang yang mungkin sekarang menolak pembangunan, bisa jadi mereka menjadi anggota DPR di kemudian hari," ujar Dimyati.

Diketahui, awalnya DPR merencanakan pembangunan 7 proyek di kompleks gedung parlemen dengan total anggaran Rp 2,7 triliun, namun belakangan diciutkan menjadi 3 proyek dengan total anggaran sebesar Rp 2,08 triliun. Proyek itu dibiayai oleh APBN secara multiyear selama 3 tahun yakni 2016-2018. Sebagai proyek awal, anggarannya sudah disetujui sebesar Rp 740 miliar dan masuk di APBN 2016. Dana itu untuk pembangunan ruang kerja anggota DPR. ■ HPS